
Analysis of Competency Aspects of Regional Financial Administration Officials, Internal Control Systems, Implementation of Regional Financial Accounting Systems and Utilization of Information Technology in the Preparation of Regional Financial Reports

Analisa Aspek Kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

Handayani Tri Wijayanti¹⁾, Aris Tri Haryanto²⁾
STIE Atma Bhakti Surakarta¹, STIE Adi Unggul Bhirawa Surakarta²
Email : yanidiawan@yahoo.co.id¹⁾, arisharyanto26@yahoo.co.id²⁾

Abstract

This study aims to provide empirical evidence on the analysis of the influence of competence of regional financial administration officials, internal control systems, the application of regional financial accounting systems, and the use of information technology on the preparation of regional financial reports (Study on the Regional Work Unit of Sukoharjo Regency). The population of this research is 12 Regional Apparatus Work Units of Sukoharjo Regency with a total of 772 employees. The sample taken was 15% of the total population, namely $772 \times 15\% = 115.8$ respondents who were rounded up to 120 by random sampling technique. The result of the research is that the competence of regional financial administration officials has a significant positive effect on the preparation of financial statements. The internal control system has a significant positive effect on the preparation of financial statements. The application of the regional financial accounting system has a significant positive effect on the preparation of financial statements. The use of information technology has a significant positive effect on the preparation of financial statements. The adjusted R square value is 0.844. This shows that the magnitude of the influence of the independent variables, namely the competence of regional financial administration officials, internal control systems, the application of regional financial accounting systems, and the use of information technology on the dependent variable of the preparation of regional financial statements which can be explained by this equation model is 84.4%, the rest is 15.6% is influenced by other factors that are not included in the regression model.

Keywords: *Competence of Regional Financial Administration Officials, Internal Control System, Implementation of Regional Financial Accounting System, Utilization of Information Technology, Preparation of Regional Financial Reports*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris tentang analisa pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap penyusunan laporan keuangan daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo). Populasi penelitian ini adalah 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo sejumlah 772 pegawai. Sampel yang diambil sebesar 15% dari jumlah populasi, yaitu $772 \times 15\% = 115,8$ responden yang dibulatkan menjadi 120 dengan teknik *random sampling*. Hasil penelitian adalah kompetensi pejabat penatausahaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan. Nilai *adjusted R square* adalah sebesar 0,844. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh variabel independen yaitu kompetensi pejabat penatausahaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap variabel dependen penyusunan laporan keuangan daerah yang dapat diterangkan oleh model persamaan ini sebesar 84,4%, sisanya sebesar 15,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi.

Kata Kunci : Kompetensi pejabat penatausahaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penyusunan Laporan Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Saat ini masyarakat menuntut adanya akuntabilitas di pelayanan sektor publik. Memberikan kualitas laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan standart yang ditetapkan perusahaan atau organisasi adalah sebuah kewajiban lembaga sektor publik, karena hasil kualitas laporan keuangan tersebut akan dapat memberikan suatu evaluasi atau penilaian terhadap kinerja suatu perusahaan atau organisasi (Mardiasmo, 2002). Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 menjelaskan bahwa terdapat peraturan tentang pembuatan laporan keuangan Negara, kemudian Undang-Undang No 32 Tahun 2004 juga mengatur tentang bagaimana laporan keuangan itu disusun. Lebih lanjut PP No. 24 tahun 2005 juga menjelaskan tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan di dukung dengan PP No 71 tahun 2010, juga menjelaskan proses laporan keuangan dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi sektor publik adalah laporan terstruktur yang berisi posisi keuangan dan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas Sektor Publik dan disusun dalam suatu periode waktu pelaporan. Laporan keuangan memiliki tujuan untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat digunakan sebagai alat pengambilan keputusan, dan dapat digunakan sebagai alat untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan keuangan yang baik akan memberikan informasi yang baik pula bagi pengambil keputusan, apabila kualitas laporan keuangan yang disajikan transparan, jujur dan berkualitas serta akuntabel akan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pengambil keputusan akan mampu mengambil kebijakan yang sesuai.

Suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat dikatakan baik dalam penyusunannya dan berkualitas apabila laporan keuangan tersebut telah diperiksa dan mendapatkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan hasil yang baik pula. Terdapat lima jenis opini yang diberikan dalam pemeriksaan yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Kalimat Penjelas (WTP-DPP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP). Apabila suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapatkan penilaian yang Wajar Tanpa Pengecualian maka dapat diartikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut sudah disajikan secara wajar dan dapat dikatakan laporan tersebut berpenyusunan dengan baik (Rahman, 2015).

Menurut Bastian (2006) terdapat karakteristik kualitatif laporan keuangan, yakni dapat dipahami maksudnya informasi seharusnya diungkapkan dalam laporan keuangan sektor publik, tidak boleh disembunyikan dengan alasan apapun, kecuali berlawanan dengan hukum. Kedua relevan, informasi dikatakan relevan jika informasi memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*) sehingga sama-sama memberikan manfaat yang baik, memiliki manfaat untuk memprediksi (*predictive value*) hal ini dapat digunakan untuk peramalan kegiatan yang akan datang, tepat waktu, dan lengkap. Ketiga adalah andal, informasi dapat berarti terbebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan oleh pihak pemakainya. Keempat adalah dapat dibandingkan maksudnya dalam pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi harus disajikan secara konsisten agar dapat dibandingkan antar entitas, ataupun antar periode entitas yang sama dan berbeda.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan laporan keuangan. Hal yang pertama mempengaruhi penyusunan dari laporan keuangan adalah kompetensi pejabat penatausahaan Keuangan yang mempunyai kaitan dengan penyusunan. Menurut keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003 tanggal 21 November 2003 ditentukan bahwa penyusunan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang pegawai negeri sipil (PNS) berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 sistem pengendalian internal merupakan sebuah proses yang integral pada tindakan atau perilaku terhadap kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui beberapa kegiatan atau aktivitas yang efektif dan efisien dalam mendukung semua kinerja yang dihasilkan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap laporan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, semua hal ini akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang memang benar-benar berbobot.

Fenomena yang terjadi di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang terkait dengan analisa peran kompetensi pejabat penatausahaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah

jika Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo belum memahami sistem akuntansi dengan maksimal, maka belum memahami penyusunan laporan keuangan dengan baik dan benar, karena akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengolahan informasi yang menghasilkan keluaran berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan (Bastian, 2010).

Selain itu fenomena yang terjadi adalah pemanfaatan teknologi informasi yang dirasa masih perlu ditingkatkan kembali, teknologi merupakan alat yang digunakan individu dalam penyelesaian tugas mereka dan sebuah alat atau metode yang dapat mendukung kemudahan aktivitas dalam menjalankan tugasnya. Informasi secara mudah dapat dipahami sebagai hasil dari olahan sistem-sistem yang bertujuan untuk membantu dalam menentukan dalam pengambilan keputusan sedangkan dengan adanya teknologi dapat membantu percepatan dalam pembuatan informasi. Semakin baik teknologi yang dimanfaatkan oleh pegawai, akan semakin memberikan kemudahan dan memberikan waktu yang efektif karena pekerjaan akan dapat diselesaikan menjadi lebih cepat.

Fakta terjadi dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 533 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksanaan Semester I tahun 2016 menemukan 6.150 kasus tentang kelemahan Sisten Pengendalian Intern. Kelemahan SPI tersebut meliputi Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi Dan Pelaporan yang berjumlah 2.353 kasus, Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja yang berjumlah 2.450 kasus, dan Kelemahan Struktur Pengendalian Internal yang berjumlah 1.347 kasus. Selain penemuan tentang kelemahan atas SPI, BPK mengeluarkan hasil opini atas LKPD. Pada IHPS terdapat perubahan dan perkembangan opini dari tahun ke tahun mulai dari 2015–2019. Penulis mengambil data perkembangan di IHPS semester 1 tahun 2016 pada data kabupaten dan Kabupaten provinsi Jawa Tengah. Tabel 1.1 akan dijelaskan tentang perkembangan opini yang didapatkan Kabupaten, Kabupaten, dan Provinsi di Jawa Tengah.

Tabel 1
Opini LKPD Kabupaten Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011-2015

TAHU N	OPINI										
	WTP	%	WTP -DPP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	JM L
2015	7	19 %	1	3%	28	78 %	0	0 %	0	0 %	36
2016	10	28 %	1	3%	25	69 %	0	0 %	0	0 %	36
2017	6	17 %	5	14 %	25	69 %	0	0 %	0	0 %	36
2018	6	17 %	6	17 %	24	67 %	0	0 %	0	0 %	36
2019	1	3%	20	56 %	15	42 %	0	0 %	0	0 %	36

(Sumber : www.bpk.go.id)

Penelitian ini mengacu pada penelitian Yuliarta (2013) kompetensi pejabat penatausahaan keuangan, Sistem pengendalian intern pemerintah, pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian Andini (2015) yang mempunyai hasil bahwa terdapat pengaruh positif signifikan Penyusunan Sumber daya Manusia dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap penyusunan laporan keuangan. Penelitian Rahman (2015) yang mempunyai hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Cahyono & Basukianto (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan sumber daya manusia, teknologi informasi, rekonsiliasi dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan peran Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) tidak berpengaruh signifikan.

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan fenomena yang terjadi dan pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan hasil, maka penulis ingin meneliti adanya pengaruh antara variabel tersebut jika dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan judul “Analisa Pengaruh Kompetensi pejabat penatausahaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Daerah.

METODE PENELITIAN

Teknik analisis menggunakan regresi linier berganda dengan program SPSS. 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo yang berjumlah 772 pegawai adalah populasi dalam penelitian ini. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 15% dari jumlah populasi, yaitu $772 \times 15\% = 115,8$ responden yang dibulatkan menjadi 120 agar hasil yang dihasilkan lebih baik. Berdasarkan perhitungan tersebut maka sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sejumlah 120 responden yang terbagi 12 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2. Jumlah kuesioner dan tingkat pengembalian kuesioner

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH SAMPEL	JUMLAH SAMPEL	Persentase Pengembalian (%)
1	Badan Perencanaan , Penelitian, dan Pengembangan Daerah	10	10	100%
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10	10	100%
3	Dinas Kesehatan	10	10	100%
4	Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian	10	10	100%
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	10	10	100%
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	10	10	100%
7	Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang	10	10	100%
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	10	10	100%
9	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	10	10	100%
10	Dinas Perdagangan	10	10	100%
11	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah	10	10	100%
12	Dinas Perhubungan, Perumahan dan Kawasan Permukiman	10	10	100%
Jumlah		120	120	100%

HASIL PENELITIAN

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil penelitian menjelaskan semua item pertanyaan adalah valid dan reliabel. Hasil penelitian dikatakan valid karena nilai $r_{item} > r_{tabel}$. Sehingga pertanyaan yang digunakan adalah tepat untuk mengukur variabelnya. Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

<i>N</i> <i>o</i>	<i>Variabel</i>	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Kriteria</i>	<i>Keterangan</i>
1	Kompetensi pejabat penatausahaan Keuangan Daerah	0,649	Cronbach's Alpha > 0,60 maka Reliabel	Reliabel

2	Sistem Pengendalian Internal	0,857	Cronbach's Alpha > 0,60 maka Reliabel	Reliabel
3	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,711	Cronbach's Alpha > 0,60 maka Reliabel	Reliabel
4	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,723	Cronbach's Alpha > 0,60 maka Reliabel	Reliabel
5	Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0,743	Cronbach's Alpha > 0,60 maka Reliabel	Reliabel

Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		120
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,86904612
Most Extreme Differences	Absolute	,080
	Positive	,046
	Negative	-,080
Kolmogorov-Smirnov Z		,873
Asymp. Sig. (2-tailed)		,431

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan hasil hasil *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan angka 0,873 dengan tingkat signifikansi 0,431 yang lebih besar dari 0,05. Berdasarkan kriteria tersebut maka dapat dinyatakan bahwa seluruh data dalam penelitian ini terdistribusikan secara normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

		Coefficients					Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	2,890	1,188		2,432	,017		
	Kualitas Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah	,395	,068	,311	5,832	,000	,463	2,161
	Sistem pengendalian Internal	,260	,041	,379	6,421	,000	,377	2,649
	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,321	,071	,209	4,515	,000	,615	1,626
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,296	,072	,219	4,109	,000	,465	2,152

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan di atas menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian memiliki nilai tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat gejala multikolinearitas.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 6. Hasil Uji Autokolerasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,921 ^a	,849	,844	,884	2,211

- a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan Teknologi Informasi , Kualitas Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem pengendalian Internal
- b. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Santoso (2005) menyatakan kriteria yang digunakan dalam menentukan autokorelasi adalah sebagai berikut : jika nilai dw di bawah -2 diindikasikan ada autokorelasi positif, jika nilai dw di antara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi, dan jika nilai dw di atas +2 berarti diindikasikan bahwa ada autokorelasi negatif. Berdasarkan hasil Durbin Watson dapat dilihat hasil menunjukkan 2,211, dan dengan berdasarkan kriteria $-2 < 2,211 < +2$ maka dapat ditarik kesimpulan jika dalam penelitian ini tidak ada autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,560	,735		2,124	,036
	Kualitas Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah	-,010	,042	-,031	-,229	,819
	Sistem pengendalian Internal	,026	,025	,151	1,021	,309
	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	-,075	,044	-,198	-1,707	,091
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	-,029	,044	-,086	-,645	,520

a. Dependent Variable: Absut

Kesimpulan dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas dalam regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis

1. Uji Regesi Linier Berganda

Tabel 6. Hasil Persamaan Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2,890	1,188		2,432	,017		
	Kualitas Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah	,395	,068	,311	5,832	,000	,463	2,161
	Sistem pengendalian Internal	,260	,041	,379	6,421	,000	,377	2,649
	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,321	,071	,209	4,515	,000	,615	1,626
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,296	,072	,219	4,109	,000	,465	2,152

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Dalam menyusun persamaan regresi linier dapat dilihat dari β dalam *Unstandardized Coefficients*.
Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah : $Y = 2,890 + 0,395X_1 + 0,260X_2 + 0,321X_3 + 0,296X_4$

Berdasarkan persamaan regresi linier di atas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) $\beta_1 = 0,395$, menunjukkan bahwa variabel kompetensi pejabat penatausahaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat berarti jika kompetensi pejabat penatausahaan keuangan daerah ditingkatkan maka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah menjadi lebih baik dan bisa diandalkan.
- 2) $\beta_2 = 0,260$, menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat berarti jika sistem pengendalian internal ditingkatkan maka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah akan semakin baik dan dapat diandalkan.
- 3) $\beta_3 = 0,321$, menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat berarti jika organisasi menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah yang lebih baik dan lebih optimal maka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat meningkat.
- 4) $\beta_4 = 0,296$, menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat berarti jika pemerintah daerah dapat memanfaatkan teknologi informasi dengan baik dan mengikuti perkembangannya, maka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat meningkat dan dapat diandalkan.

2. Hasil Uji Statistik t

- a. Variabel Kompetensi pejabat penatausahaan Keuangan Daerah
Berdasarkan hasil uji parsial nilai signifikansi Kompetensi pejabat penatausahaan Keuangan Daerah $0,000 < 0,05$ maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Kesimpulan yang diambil adalah variabel Kompetensi pejabat penatausahaan Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Hasil ini mendukung penelitian Yuliarta, (2013).
- b. Variabel Sistem Pengendalian Internal
Berdasarkan hasil uji parsial nilai signifikansi Sistem Pengendalian Internal $0,000 < 0,05$ maka H_2 dapat diterima dan H_0 ditolak. Kesimpulan yang dapat diambil adalah variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Hasil ini mendukung penelitian Yuliarta, (2013).
- c. Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
Berdasarkan hasil uji parsial nilai signifikansi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah $0,000 < 0,05$ maka H_3 dapat diterima dan H_0 ditolak.. Kesimpulan yang dapat diambil adalah variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Hasil ini mendukung penelitian Dicky (2015).
- d. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi
Berdasarkan hasil uji parsial nilai signifikansi Pemanfaatan Teknologi Informasi $0,000 < 0,05$ maka H_4 dapat diterima dan H_0 ditolak.. Kesimpulan yang dapat diambil adalah variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Hasil ini mendukung penelitian Dicky (2015).

PEMBAHASAN HASIL

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis melakukan pembahasan mengenai pengaruh kompetensi pejabat penatausahaan keuangan daerah, sistem pengendalian internal, penerapan

sistem akuntansi keuangan daerah, terhadap penyusunan laporan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo. Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan daerah (X_1), sistem pengendalian internal (X_2), penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X_3), dan pemanfaatan teknologi informasi (X_4) berpengaruh terhadap penyusunan laporan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo adalah sebesar 84,4%, sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pejabat penatausahaan keuangan daerah merupakan variabel yang paling dominan atau yang paling tinggi pengaruhnya terhadap peningkatan penyusunan laporan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo. Hal ini disebabkan karena kompetensi pejabat penatausahaan keuangan daerah mempunyai nilai koefisien variabel paling tinggi yaitu sebesar 0,395.

Hal ini dapat berarti bahwa semakin baik kompetensi pejabat penatausahaan keuangan daerah akan semakin baik pula penyusunan laporan keuangan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan Yuliarta (2013) yang membuktikan bahwa kompetensi pejabat penatausahaan keuangan mempunyai pengaruh yang positif signifikan pada penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pejabat penatausahaan keuangan daerah adalah dengan cara:

1. Meningkatkan pemahaman akan uraian tugas dan fungsi sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK).
2. Meningkatkan pengetahuan yang baik di bidang akuntansi dan adanya upaya dalam meningkatkan pengetahuan dibidang akuntansi.
3. Meningkatkan kemampuan menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
4. Meningkatkan kegiatan pelatihan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan dari PA dan PPK.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil olah data di atas untuk membuktikan hipotesis, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian Analisa Pengaruh Kompetensi pejabat penatausahaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Internal, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat sebagai berikut :

1. Kompetensi pejabat penatausahaan keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo.
2. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo.
3. Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo.
4. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap penyusunan laporan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo.

Saran dan rekomendasi

1. Variabel kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah merupakan variabel paling dominan, sehingga kompetensi Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah perlu ditingkatkan yaitu dengan cara:
 - a. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah mempunyai kemampuan yang baik dibidang akuntansi
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah selalu mengikuti pelatihan terkait dengan peningkatan kualitas sebagai pejabat penatausahaan laporan keuangan
 - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah memahami fungsi dan uraian tugas sebagai PA dan PPK dengan baik.

2. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan dapat menambah variabel lain misalnya pengawasan keuangan daerah dan nilai informasi keuangan daerah, selain itu agar dapat memperluas obyek penelitian, hal ini bertujuan agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, W. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kab . Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 5(1), 69–80.
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik edisi ketiga: Suatu Pengantar* (Edisi Ke I). Jakarta: Erlangga.
- Bodnar, G. H., Hopwood, W. S., & Jusuf, A. A. 2000. *Sistem Informasi Akuntansi* (Edisi VI). Jakarta: Salemba Empat.
- Dwi Permadi, A. 2013. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat)*. Universitas Widyatama.
- Harahap, Sofyan S. 2012. *Teori Akuntansi2011* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Jogianto, H. 2009. *Sistem Teknologi Informasi* (Edisi III). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi IV). Yogyakarta: Andi.
- Pradono Cahyono, P., & Basukianto. 2015. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor Yang Mempengaruhi Dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada Skpd Pemerintah Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 22(2), 188–200.
- Pramudiarta, R. 2015. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Rahman, D. 2015. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau). *Jom FEKON*, 2, 1–15.
- Saputra, A. H. 2012. Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Dan Economic Value Added (EVA) Terhadap Market Value Added (MVA) Pada Bank Central Asia , Tbk Oleh Ari Handian Saputra Program Sarjana Alih Jenis Manajemen.
- Winidyaningrum, C. 2009. *Pengaruh Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris Di Pemda SUBOSUKAWONOSRATEN)*. Universitas Sebelas Maret.
- Yuliarta. 2013. *Pengaruh Kualitas Pejabat Penatausahaan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Padang)*. Universitas Negeri Padang.